

**ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso)**

Moh. Mashudi Arif

ariefmashudi8@gmail.com

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Hendrawan Santosa Putra

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Taufik Kurrohman

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Abstract

The purpose of this study was to describe the eventual regency government readiness in implementing SAP accrual. The indicators used to assess the readiness include commitment/ integrity, human resources, facilities, and information systems. In addition this study will also describe the conditions and obstacles that occur during the preparation period and will provide an overview of SAP's strategy of accelerating the implementation of accrual through internal and external analysis. This study used a qualitative approach with quantitative tools as a medium for describing readiness. The data used is primary data obtained from observations, interviews and questionnaires. The results of this study explains that when viewed in terms of commitment, human resources, facilities, and information systems the regency government can be categorized quite ready in the analysis in general. This indicates that most on education still has the ability and capacity to implement accrual-based SA . based on the percentage of readiness on education , 50 % on education categorized as "less", while the "good" only 3.8 % remaining in the category of "pretty" by 46.2 %. The analysis of each variable is also not much different, of the four variables used commitment, human resources, and infrastructure criteria entered into the "pretty" and only variables or indicators of system information that has the criteria of "good". The results of the road map analysis explaining that the regency government has some weaknesses and obstacles in implementing SAP accrual. The weaknesses include the lack of qualified human resources and infrastructure as well as less than the maximum support from the leadership on education. Strategies that can be used by the regency government as a form of accelerated accrual of SAP implementation, namely the aggressive strategy.

Keywords: *SAP Accrual, Readiness, Commitment, Human Resources, Infrastructure, Information Systems*

1 PENDAHULUAN

Reformasi keuangan pemerintah pada tahun 2003 ditandai dengan diberlakukannya Undang-undang No. 17 Tahun 2003. Pasal 36 UU No. 17 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa Pemerintah Indonesia diharuskan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan berbasis akrual selambat-lambatnya lima tahun setelah peraturan tersebut ditetapkan. Artinya Pemerintah Indonesia harus sudah melaksanakan pengelolaan keuangan basis akrual pada tahun 2008 (Nordiawan, 2008). Namun yang terjadi adalah sampai saat ini pemerintah masih belum melaksanakan amanat tersebut. Perkembangan akuntansi pemerintahan pun ditandai dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah (Berbasis *Cash Toward Accrual*) sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Pemberlakuan SAP CTA tersebut bertujuan agar SAP CTA bisa menjembatani pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan berbasis akrual.

Pada tahun 2010 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang penggunaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Pemerintah merencanakan bahwa SAP akrual selambat-lambatnya harus dilaksanakan pada tahun 2015. Selama rentang waktu tersebut diharapkan seluruh elemen pemerintahan berbenah untuk menyiapkan hal tersebut mulai dari menyiapkan sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, sistem informasi, dan pemerintah harus memiliki komitmen dan integritas yang tinggi untuk melaksanakan SAP akrual (Mulyana, 2009)

Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso (Pemkab Bondowoso) juga merupakan entitas pemerintah yang harus melaksanakan SAP berbasis akrual. Sebagai entitas pemerintah, Pemda Bondowoso menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai sumber pendanaan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Untuk itu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas Pemda Bondowoso juga harus melaporkan pengelolaan keuangan atas APBD tersebut kepada *stakeholder* berdasarkan aturan yang berlaku yakni dengan menggunakan SAP berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 tahun 2010. Untuk mengatasi hal tersebut Pemda Bondowoso harus mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP berbasis akrual. Persiapan yang memadai mulai dari peningkatan kemampuan SDM, pengadaan sarana dan prasarana yang kompatibel, menyiapkan segala macam sistem informasi terkait dengan penerapan SAP berbasis akrual.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana kesiapan yang telah dilakukan oleh Pemda Bondowoso terkait dengan penerapan SAP berbasis akrual pada tahun 2015 mendatang. Kesiapan yang dilakukan dilihat dari perspektif SDM, sarana prasarana, dan sistem informasi, serta komitmen dari pejabat publik yang diperlukan untuk implementasi SAP berbasis akrual. Oleh karena itu judul yang diangkat dalam penelitian ini “Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso)”. Penelittian ini merupakan replikasi dari beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan. peneliti ingin mengetahui apakah indikasi keterlambatan penerapan

SAP akrual terjadi di Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1 Bagaimana kesiapan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual jika dilihat dari perspektif komitmen, SDM, sarana prasarana, serta sistem informasi?
- 2 Bagaimana kondisi hambatan dan solusi yang diperlukan Pemkab Bondowoso untuk menerapkan SAP akrual?

Bagaimanakah model strategis akselerasi pelaksanaan SAP akrual pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso?

2 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian akan menggunakan alat bantu kuantitatif untuk mendeskripsikan kesiapan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari hasil obeservasi, wawancara, dan kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada beberapa sampel penelitian yaitu 26 SKPD yang terdiri dari dinas, badan, dan kantor. Sedangkan data-data kualitatif berupa kata-kata dan percakapan diperoleh dari beberapa informan. Berikut ini merupakan informan yang digunakan dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini

- 1 Kuasa BUD DPPKD Kabupaten Bondowoso
- 2 Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Keuangan Daerah DPPKD
- 3 Kepala Seksi Fasinkeu DPPKD Kabupaten Bondowoso
- 4 Kepala Bidang Pengawasan Kantor Inspektorat
- 5 Kepala Seksi Pengawasan Bidang Pemerintahan Kantor Inspektorat
- 6 Kepala Sub Bagian Sosial dan Budaya Bapekab

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa model analisis. Pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan penilaian kesiapan dilakukan dengan menggunakan alat analisis kuantitatif deskriptif. Sedangkan untuk pertanyaan kondisi kesiapan dianalisis menggunakan analisis *roadmap*, serta untuk pertanyaan mengenai model strategis akselerasi dianalisis menggunakan analisis faktor internal dan faktor eksternal. Tabel berikut ini menjelaskan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

*ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso)*

Tabel 1. Teknik Analisis Data

Subyek	Indikator	Analisis	Output
Kesiapan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam penerapan SAP akrual	SDM, komitmen, sarana prasarana, sistem informasi	Kuantitatif	Deskripsi kesiapan Pemerintah Kabupaten Bondowoso
Kondisi kesiapan dan hambatan penerapan SAP akrual	Kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan	Roadmap	Deskripsi kondisi pelaksanaan SAP akrual
Model strategi akselerasi pelaksanaan SAP berbasis akrual	IFAS & EFAS	Kualitatif	Model strategi yang sesuai pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso

Sumber: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemendagri.

Data kuantitatif diperoleh dari kuesioner yang akan dinilai dengan menggunakan skala likert. Penilaian akan dilakukan dengan mengalikan bobot setiap indikator dengan skor yang diperoleh setiap item. Kemudian hasil perkalian tersebut dijumlahkan pada setiap SKPD untuk menilai kesiapan. Hasil penilaian setiap SKPD akan di rata-rata untuk mendeskripsikan kesiapan Pemerintah Kabupaten Bondowoso secara umum. Kuesioner yang digunakan terdiri dari empat variabel dan 34 item pernyataan. Berikut ini merupakan bobot dan skala penilaian kesiapan yang digunakan.

Tabel 2. Bobot Variabel/Indikator Kesiapan

No.	Variabel	Bobot	Jumlah Indikator
1	Komitmen	0,35	11
2	SDM	0,25	11
3	Sarana Prasarana	0,20	6
4	Sistem Informasi	0,20	6
Jumlah		1,00	34

Sumber: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemendagri

Tabel 3. Kriteria Penilaian

No.	Kriteria	Nilai
1	Sangat Baik	>49
2	Baik	41-48
3	Cukup	33-40
4	Kurang	25-32
5	Sangat Kurang	<24

Sumber: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemendagri

Tabel 4. Skala Penilaian Variabel

No	Kriteria	Komitmen	SDM	Sarana Prasarana	Sistem Informasi
1	Sangat Baik	>1.74	>1.24	>0.9	>0.9
2	Baik	1.46-1.73	1.04-1.23	0.74-0.98	0.74-0.98
3	Cukup	1.18-1.45	0.84-1.03	0.57-0.73	0.57-0.73
4	Kurang	0.9-1.17	0.63-0.83	0.4-0.56	0.4-0.56
5	Sangat Kurang	<0.9	<0.63	<0.4	<0.4

Sumber: Data primer diolah

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Pengujian penelitian dilakukan dengan beberapa tahap. Hasil dari kuesioner diuji validitas dan reliabilitas data. Hasil pengujian validitas dengan menggunakan *Pearson Product Moment* menunjukkan data setiap item (34 item) memiliki tingkat signifikansi tidak lebih dari 0,005. Artinya data yang diperoleh memiliki validitas yang baik. Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan nilai *alpha* dari setiap variabel diatas 0,80, sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat reliabilitas yang baik.

Hasil penilaian kesiapan Pemkab Bondowoso diperoleh hasil seperti tabel berikut ini

Tabel 5. Persentase Penilaian SKPD

Keterangan	Jumlah	Persentase
Jumlah SKPD berkategori baik	1	3,80%
Jumlah SKPD berkategori cukup	12	46,20%
Jumlah SKPD berkategori kurang	13	50.00%
Jumlah keseluruhan SKPD	26	100.00%

Sedangkan hasil penilaian untuk melihat kesiapan dari masing-masing variabel dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini

Tabel 6. Penilaian Variabel

Variabel	Nilai	Kriteria
Komitmen	1,37	Cukup
SDM	0,90	Cukup
Sarana Prasarana	0,70	Cukup
Sistem Informasi	0,73	Cukup

3.2 Pembahasan

3.2.1 Analisis Kesiapan

Rencana pemerintah pusat untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) akrual pada tahun 2015 cukup realistis, mengingat sistem akuntansi akrual yang merupakan sesuatu yang baru di dunia pemerintahan.

Penerapan SAP akrual dengan metode bertahap dilakukan mengingat kondisi dan situasi yang belum bisa terpenuhi dengan baik, seperti kesiapan sumber daya manusia, kesiapan sarana dan prasarana, kesiapan sistem informasi dan komitmen dari para pemimin daerah yang perlu dibentuk untuk melaksanakan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.

Komitmen merupakan elemen pokok yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan SAP akrual. Kuesioner untuk variabel komitmen diwakili oleh 11 pernyataan. Hasil penilaian menggambarkan bahwa, jika dilihat dari segi komitmen Pemerintah Kabupaten Bondowoso dapat dikategorikan cukup. Nilai skor rata-rata yang diperoleh atas pernyataan dari variabel komitmen adalah 1.37 (cukup). Hasil penilaian tersebut ternyata tidak jauh berbeda dengan hasil dari wawancara kepada beberapa informan yang menunjukkan adanya dukungan yang kuat terhadap penerapan SAP akrual dari eksekutif dan lembaga pemerintahan yang lain. Menurut Kasi Sosial dan Budaya Bapeda Pemkab Bondowoso menjelaskan bahwa PP no. 71 tahun 2010 itu sudah menjadi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Aturan tersebut harus ditaati dan dilaksanakan oleh setiap entitas pemerintahan, sehingga cepat atau lambat, siap atau tidak siap, aturan tersebut harus dijalankan. Pemkab Bondowoso berupaya se-maksimal mungkin untuk melaksanakan penerapan SAP akrual tersebut karena itu sudah menjadi peraturan. Bentuk komitmen dari Pemkab Bondowoso diwujudkan dalam persetujuan upaya persiapan yang diprogramkan oleh DPPKD untuk pengembangan pengelolaan keuangan daerah termasuk didalamnya yakni persiapan terkait implementasi SAP akrual. Program yang dibuat oleh DPPKD telah sepenuhnya di akomodir dan di anggarkan dalam APBD Kabupaten Bondowoso pada tahun 2014.

Kepala Sub Bagian Akuntansi DPPKD juga menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bondowoso mempunyai komitmen untuk menerapkan SAP berbasis akrual, beliau menyatakan bahwa dalam upaya meningkatkan kemampuan pengelolaan yang akuntabel dan transparan menjadi komitmen dari bupati. Perencanaan yang diajukan oleh DPPK selaku instansi yang berwenang dalam mempersiapkan SAP akrual seluruhnya didukung dan diakomodir dalam APBD Kab. Bondowoso T.A 2014 sebagai prioritas karena merupakan amanat undang-undang. Program yang direncanakan yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari kurang lebih 17 kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014.

Selain faktor komitmen, faktor sumber daya manusia juga menjadi variabel yang berpengaruh besar terhadap kesuksesan penerapan SAP akrual (Novalia, 2012). Meskipun tidak semua SDM di Kabupaten Bondowoso mumpuni secara material terhadap penerapan SAP akrual namun sebagian besar siap untuk menerima dan beralih ke standar akuntansi yang baru di tahun 2015.

Hasil penilaian SDM menunjukkan skor rata-rata 0.90 yang berarti bahwa, jika dilihat dari perspektif kesiapan SDM, Pemkab Bondowoso dapat dikategorikan cukup siap untuk menerapkan SAP akrual. Pengukuran variabel SDM diwakili oleh 11 indikator pernyataan yang ada didalam kuesioner dengan bobot setiap kuesioner 0.25.

Hasil wawancara kepada Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Kasubid. Fasinkeu DPPKD dapat diperoleh informasi bahwa untuk PP No. 71 tahun 2010 tentang penerapan SAP berbasis akrual memang belum dilakukan sosialisasi dan bintek kepada seluruh jajaran PPK dan Bendahara di setiap SKPD. Alasannya bahwa fokus utama DPPKD untuk sementara adalah menyiapkan kemampuan SDM dari internal DPPKD terlebih dahulu dan menunggu Peraturan Menteri Dalam Negeri keluar. Permendagri sebagai produk hukum resmi memang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan PP no. 71 tahun 2010, di dalam Permendagri akan dimuat ketentuan teknis mengenai Pedoman Kebijakan Akuntansi yang akan dibuat pemerintah daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), Badan Akun Standar (BAS) dan prosedur konsolidasi laporan keuangan.

Pada tahapan Permendagri sudah keluar, maka proses utama yang harus dilakukan adalah menyiapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, serta pelaksanaan proses *transfer knowledge* kepada seluruh SDM yang terkait dengan pengelolaan keuangan di setiap SKPD. Lambatnya proses persiapan SDM dikarenakan DPPKD tidak mau mengambil resiko dengan melakukan pelatihan dan bintek terlebih dahulu karena pedoman teknis (Permendagri) belum terbentuk sehingga setelah terbentuk, baru dilakukan bintek serta pelatihan khusus untuk SAP akrual.

Selain komitmen dan SDM, elemen lain yang juga berperan dalam penerapan SAP akrual adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Sarana prasarana sangat dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan, sarana prasarana meliputi ketersediaan ruangan khusus, perangkat keras komputer yang digunakan untuk SIMDA serta peralatan penunjang kegiatan. Ketersediaan sarana prasarana yang memadai akan membantu penerapan SAP akrual lebih terjamin karena SDM telah ditunjang dengan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan fungsinya. Mengingat peran sarana dan prasarana juga relatif berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP akrual, maka harus dilakukan penilaian terhadap kesiapan tersebut, berikut ini merupakan tabel yang mendeskripsikan kesiapan Pemkab Bondowoso jika dilihat dari perspektif sarana dan prasarana.

Angka rata-rata kesiapan sarana prasarana menunjukkan nilai 0.71 yang mengindikasikan bahwa sarana prasarana Pemkab Bondowoso telah cukup memadai untuk melaksanakan SAP akrual, selain itu ketersediaan sarana prasarana mengindikasikan bahwa untuk kegiatan mengelola keuangan daerah yang dilakukan oleh staf maupun Pejabat Penatausahaan Keuangan telah terfasilitasi dengan baik, hampir diseluruh SKPD telah tersedia fasilitas khusus bagi Bendahara dan PPK untuk melaksanakan fungsinya dengan baik. Begitu juga dengan perangkat yang digunakan Bendahara untuk memproses transaksi bisnis yang ada telah sepenuhnya disediakan oleh SKPD.

Hasil informasi dari kepala sub bagian akuntansi yang memaparkan bahwa, memang untuk mempersiapkan SDM di setiap SKPD terutama dalam hal pengelolaan keuangan sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab DPPKD. Sarana prasarana menjadi tanggung jawab dari masing-masing Pengguna Anggaran (PA) di masing-masing SKPD. PA akan mengalokasikan sebagian dari

anggarannya untuk pengadaan fasilitas dan sarana prasarana yang dibutuhkan terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Sehingga kesimpulannya Pemkab Bondowoso cukup siap untuk melaksanakan SAP akrual jika ditinjau dari segi sarana dan prasarana yang memadai

Pelaksanaan SAP akrual juga tidak mungkin lepas dari peranan sistem informasi. Sistem informasi akan membantu pengguna SAP akrual untuk mengelola data keuangan daerah untuk dijadikan laporan keuangan daerah. Sistem akuntansi dalam konteks penerapan SAP akrual yaitu kesediaan perangkat lunak (*software*) untuk mengaplikasikan proses bisnis di pemerintahan. Pada penerapan SAP CTA tahun 2005, sistem informasi keuangan daerah menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Simda) yang disediakan oleh BPKP, sedangkan untuk SAP akrual pemerintah daerah juga akan menggunakan *software* yang sama yang dibuat oleh BPKP yang rencananya akan *launching* pada tahun 2014. Mengingat peran strategis dari sistem informasi tersebut, maka penilaian atas kesiapan sistem informasi dalam penerapan SAP akrual harus dilakukan.

Hasil kuesioner yang dibagikan dapat disimpulkan bahwa Pemkab Bondowoso cukup siap untuk menerapkan SAP akrual. Skor rata-rata menunjukkan angka 0.73 yang berarti Pemkab Bondowoso masuk kedalam kategori cukup siap. Hasil keterangan dari informan menyatakan bahwa memang dibutuhkan suatu sistem yang komprehensif dan terintegrasi untuk mengakomodir kebutuhan pelaksanaan SAP akrual. SAP akrual memang lebih rumit dari pada SAP berbasis kas modifikasi yang saat ini diterapkan. Hal itu tercermin dari adanya jenis laporan keuangan yang lebih banyak dihasilkan, selain itu karena proses penganggaran yang masih menggunakan basis kas maka Laporan Anggaran juga harus dilaksanakan atas basis kas. Sistem akuntansi yang rumit ini harus bisa terekam dengan baik oleh sistem informasi yang nantinya akan digunakan.

Selama penerapan SAP berbasis kas modifikasi, Pemkab Bondowoso melakukan kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur. Kerjasama tersebut berupa penyediaan perangkat lunak (SIMDA) yang digunakan untuk proses operasional dari SAP CTA. Sehingga dalam hal penyiapan dan penerapan SAP akrual Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga akan menggunakan SIMDA berbasis akrual yang dibuat oleh BPKP. Informasi yang diperoleh dari DPPKD menyatakan bahwa untuk penggunaan perangkat informasi masih menunggu pengenalan sistem baru oleh BPKP pada tahun 2014. Menurut Kasi Fasinkeu DPPK, Apabila dari BPKP belum *launching* perangkat lunak untuk SAP akrual, maka sistem pencatatan akan menggunakan perangkat yang di desain sendiri dari internal DPPKD Bondowoso dengan menggunakan program *Microsoft Excel Macro*. Program atau aplikasi yang didesain sendiri tersebut rencananya akan digunakan untuk melakukan *pilot project* penerapan SAP akrual di beberapa SKPD sebagai acuan pelaksanaan pada tahun 2015 mendatang.

Kondisi kesiapan dan serta upaya yang telah dilakukan oleh Pemkab Bondowoso menunjukkan bahwa mereka memang memiliki komitmen yang kuat terkait dengan pelaksanaan SAP berbasis akrual. terbukti dengan sudah adanya perencanaan yang cukup baik meskipun masih dilaksanakan di level SKPKD.

Hasil analisis kesiapan elemen-elemen kunci dalam penerapan SAP akrual diatas menunjukkan hasil yang cukup untuk menyimpulkan bahwa secara umum Pemkab Bondowoso cukup siap untuk melaksanakan SAP berbasis akrual, meskipun memang masih ada beberapa persiapan yang harus dilakukan untuk mencapai pelaksanaan pada 2015 mendatang.

3.2.2 Analisis Roadmap

Analisis roadmap mengenai kondisi penerapan SAP akrual pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso memperlihatkan masih terdapat beberapa kelemahan yang menjadi hambatan dalam mempersiapkan dan melaksanakan SAP akrual. Kelemahan yang dapat diidentifikasi adalah mengenai kesiapan SDM yang ada di SKPD. *Transfer knowledge* diakui menjadi suatu hambatan yang cukup berat yang harus dilalui oleh DPPKD untuk menyiapkan elemen keuangan di setiap SKPD. Maka dari itu dengan minimnya waktu persiapan, harus ada strategi dan langkah-langkah taktis untuk mengatasi hal tersebut. Untuk itu Pemkab Bondowoso melalui DPPKD menrencanakan beberapa program pelatihan, bintek, sosialisasi dan pendampingan terkait dengan penerapan SAP akrual.

Beberapa kelemahan yang lain adalah pada kegunaan informasi akuntansi bagi stakeholder. Informasi akrual sebenarnya memberikan informasi yang akurat dan relevan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam pengalokasian sumber daya dan perhitungan biaya layanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Namun nampaknya hal tersebut kurang disadari oleh beberapa stakeholder di SKPD. Oleh karena itu perlu adanya suatu upaya dari pimpinan daerah (Bupati) untuk membahas dan memberikan gambaran mengenai manfaat dan kegunaan informasi akrual. karena tujuan utama dari penggunaan SAP akrual adalah untuk bisa memberikan informasi yang relevan kepada stakeholder untuk meningkatkan kualitas keputusan /kebijakan yang diambil.

Kelemahan yang terakhir yang bisa diidentifikasi adalah mengenai kesiapan sistem informasi yang akan digunakan. Pada tahun 2014 ada rencana dari DPPKD Kab. Bondowoso untuk melaksanakan *Pilot Project* di beberapa SKPD yang memiliki kualitas baik. Namun yang akan menjadi kendala bukan pada SDM, tetapi pada sistem informasi yang akan digunakan mengingat sampai saat ini BPKP masih belum mengeluarkan Simda berbasis akrual. Solusi yang mungkin dilaksanakan untuk mengatasi keterbatasan tersebut adalah dengan mengembangkan perangkat lunak secara mandiri, hal tersebut diungkapkan oleh Kasubid. Fasinkeu DPPKD yang menyatakan akan ada upaya dan pemikiran untuk mengembangkan perangkat lunak sendiri meskipun masih berbasis excel dengan harapan paling tidak ada gambaran yang diperoleh SKPD tentang penerapan SAP akrual di tahun 2015 nanti.

Berdasarkan kelemahan tersebut dapat diidentifikasi solusi dan langkah-langkah taktis yang dibisa diambil oleh Pemerintah Daerah Kab. Bondowoso. Namun pelaksanaan dari solusi tersebut harus melihat kemampuan daerah mengingat implementasi SAP akrual membutuhkan dana yang cukup dengan persiapan yang matang dan terstruktur terkait dengan semua faktor-faktor yang berpengaruh, sehingga solusi yang diambil dapat menghasilkan output yang maksimal.

3.2.3 Analisis Faktor Internal dan Eksternal

Penerapan SAP berbasis akrual tidak dapat dilakukan semudah membalik tangan. Banyak hal yang harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang, sehingga dalam masa persiapan maupun penerapan juga tidak menimbulkan suatu hambatan yang berarti, maka untuk melaksanakan persiapan maupun penerapan SAP akrual diperlukan suatu strategi pelaksanaan yang merumuskan langkah-langkah konkrit dan sistematis.

Strategi yang diperlukan dalam penerapan SAP akrual dapat diidentifikasi dari Analisis Faktor Internal dan Analisis Faktor Eksternal. Analisis tersebut dilakukan untuk memberikan arahan yang jelas mengenai langkah-langkah yang ditempuh sebagai tindak lanjut atas solusi yang telah diungkap pada pembahasan sebelumnya. Analisis Faktor Internal merupakan sebuah analisis yang akan mengidentifikasi faktor-faktor dari dalam instansi yang menjadi kekuatan maupun kelemahan (Hunger, 2003). Faktor-faktor tersebut kemudian disusun kedalam sebuah matrik sesuai dengan pembobotan untuk setiap item faktor. Dalam penelitian ini, pembobotan dilakukan berdasarkan *profesional judgement* yang berlandaskan pada fakta-fakta yang terjadi dilapangan dan pertimbangan dari penelitian terdahulu (Penelitian Kemendagri). Analisis Faktor Eksternal adalah sebuah analisis mengenai pengaruh faktor/item yang berasal dari luar instansi/institusi yang duwujudkan dalam bentuk peluang dan ancaman yang berpengaruh dalam usaha mencapai tujuan (Hunger, 2003).

Hasil pembahasan sebelumnya menyatakan bahwa secara umum Pemkab Bondowoso cukup siap untuk melaksanakan SAP akrual, meskipun terdapat beberapa kekurangan yang terjadi. Mengingat waktu persiapan yang semakin pendek maka diperlukan strategi akselerasi untuk mengatasi beberapa kekurangan tersebut.

Analisis faktor internal dan eksternal menggambarkan bahwa Pemkab Bondowoso memiliki kekuatan dari dalam internal yang cukup tinggi meskipun juga ada beberapa kelemahan, begitu juga dengan peluang mereka untuk menerapkan SAP berbasis akrual cukup besar walaupun ada ancaman yang membayangi penerapan SAP tersebut

Kekuatan dari internal Pemkab meliputi adanya komitmen dan integritas yang tinggi, Pemkab telah menyelesaikan Kebijakan Akuntansi, Pemkab telah mempunyai sarana prasarana yang memadai, adanya perencanaan yang cukup baik, adanya dukungan dari badan audit internal. Kelemahan meliputi tingkat kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai, lambatnya proses sosialisasi, belum adanya SKPD yang melaksanakan SAP secara simultan sebagai *pilot project*.

Peluang yang dihadapi oleh Pemkab Bondowoso meliputi adanya dukungan dan komitmen dari Pemerintah Pusat, terbitnya Permendagri no. 64 sebagai pedoman pelaksanaan SAP akrual, adanya tuntutan dari stakeholder untuk penerapan SAP akrual. Ancaman yang dihadapi Pemkab Bondowoso meliputi belum terbitnya pedoman teknis penyusunan dan pelaporan SAP akrual, rendahnya kuota dan batasan rekrutmen SDM yang kompeten, belum adanya aplikasi sistem akuntansi keuangan daerah.

Berdasarkan uraian analisis faktor internal dan eksternal diatas, maka Pemkab Bondowoso dapat dikategorikan kedalam kuadaran I yakni meskipun memiliki kelemahan dan ancaman hal itu masih bisa diatasi dengan kekuatan dari segi internal dan peluang yang cukup besar untuk melaksanakan SAP berbasis akrual.

Strategi yang digunakan adalah Agresif yaitu memanfaatkan kekuatan untuk mengoptimalkan peluang. Strategi Agresif akan mengubah situasi dan kondisi yang ada sekarang mejadi sebuah kondisi yang ideal/cukup untuk mengimplementasikan SAP akrual.

Hasil pembahasan diatas menunjukkan bahwa peluang Pemkab Bondowoso sangat besar untuk melaksanakan SAP akrual, sehingga aparatur pemerintahan dapat memanfaatkan kekuatan untuk mengoptimalkan peluang yang ada. Strategi diatas menyimpulkan beberapa strategi yang harus dilaksanakan untuk bisa mempercepat proses persiapan dan penerapan SAP akrual.

Berdasarkan gambaran makro dan secara umum kondisi yang ada di Pemkab Bondowoso serta strategi yang sudah disampaikan diatas, maka peneliti memberikan rekomendasi terkait dengan penerapan SAP akrual. berikut merupakan beberapa rekomendasi:

- a. Pemerintah Kabupaten Bondowoso harus mengkomunikasikan persiapan yang direncanakan kepada seluruh elemen pemerintahan
- b. Pemerintah Kabupaten Bondowoso hendaknya menyelesaikan SAPD sesuai dengan pedoman yang ada di Permendagri no. 64 serta melakukan penyesuaian terhadap Kebijakan Akuntansi yang sudah dibuat.
- c. Pemerintah Kabupaten Bondowoso segera melakukan pengarahannya untuk mempersiapkan sistem informasi dan perangkat lunak secara mandiri paling tidak sebagai proses persiapan *pilot project*
- d. Pemerintah Kabupaten Bondowoso segera menentukan SKPD yang ditunjuk sebagai *pilot projet*
- e. Pemerintah Kabupaten Bondowoso harus melaksanakan persiapan SDM dengan *transfer knowledge* melalui sosialisai, pelatihan dan bintek yang dilakukan secara intensif pada tahun 2014
- f. Pemerintah Kabupaten Bondowoso harus menyiapkan rekrutmen SDM berkualifikasi untuk mengatasi kekurangan SDM.
- g. Pemerintah Kabupaten Bondowoso ikut serta mendorong pemerintah pusat untuk menyelesaikan petunjuk teknis penyusunan dan pelaporan SAP akrual
- h. Pemerintah Kabupaten Bondowoso segera meningkatkan sarana prasarana di SKPD.

4 KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan uraian-uraian mengenai kesiapan Pemkab Bondowoso maka kesimpulan yang didapat diambil dari penelitian ini secara umum adalah sebagai berikut:

- 1 Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada prinsipnya mempunyai komitmen untuk menerapkan SAP akrual yang diatur dalam PP No. 71 tahun 2010. Dalam hal sarana dan prasarana serta sistem informasi telah dilakukan

beberapa persiapan untuk mendukung pelaksanaan SAP tersebut. Sedangkan untuk SDM, Pemkab Bondowoso pada tahun 2014 akan melaksanakan *transfer knowledge* dalam rangka persiapan tersebut. Pada saat ini Pemkab Bondowoso telah menyelesaikan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan sedang mengerjakan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), serta merencanakan penyusunan perangkat lunak untuk media *pilot project* pelaksanaan SAP akrual secara simultan. Sehingga dalam tataran tersebut Pemkab Bondowoso dapat dikategorikan cukup siap untuk melaksanakan SAP akrual.

- 2 Hasil analisis *roadmap* kondisi persiapan Pemkab Bondowoso dalam penerapan SAP akrual, dapat disimpulkan beberapa kelemahan yang masih harus diatasi oleh Pemkab, kelemahan tersebut diantaranya:
 - a. Kualitas dan kuantitas SDM yang memiliki kompetensi dibidang akuntansi pemerintahan atau akuntansi secara umum masih kurang. Sehingga harus sering dilaksanakan pelatihan dan bintek terkait dengan penerapan SAP akrual. selain itu *recruitment* orang-orang yang kompeten dan ahli dibidang akuntansi juga bisa menjadi solusi.
 - b. Pemkab Bondowoso belum mempunyai daftar SKPD yang akan dijadikan *pilot project* penerapan SAP akrual secara simultan, selain itu juga perlu dikembangkan program sistem informasi perangkat lunak untuk digunakan dalam *pilot project* tersebut.
 - c. Beberapa SKPD masih belum memahami makna dari informasi akuntansi akrual, sehingga diperlukan pengarahan dan sosialisasi kepada kepala maupun pejabat di jajaran SKPD agar informasi akuntansi bisa berguna dalam pengambilan keputusan.
- 3 Strategi akselerasi/percepatan persiapan dalam penerapan SAP akrual di Pemkab Bondowoso yang memungkinkan untuk dilaksanakan adalah strategi Agresif, karena kekuatan dari dalam internal dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan peluang dan mengatasi kelemahan serta ancaman yang ada.

4.2 Keterbatasan

Pada pembahasan pada bab-bab sebelumnya telah dipaparkan mengenai tahapan dan proses penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan bantuan alat kuantitatif. Namun masih terdapat keterbatasan yang ada didalam penelitian ini, keterbatasan tersebut antara lain:

- a. Penelitian ini tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan karena beberapa informasi kunci bersifat rahasia sehingga tidak dapat digunakan sebagai bukti pendukung argumentasi dari peneliti, sehingga argumentasi peneliti didasarkan pada fakta dilapangan serta informasi hasil wawancara.
- b. Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian yang diambil dari penelitian terdahulu sehingga mungkin dari beberapa aspek kurang sesuai dengan kondisi pada obyek maupun kesesuaian ploting konstruk.

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian, maka penulis memberikan saran-saran kepada pembaca maupun akademisi agar bisa bermanfaat dan berguna bagi penelitian selanjutnya:

- a. Kemampuan peneliti harus lebih ditingkatkan sehingga *skill* dalam memperoleh data dan pengetahuan tentang metode pengumpulan data yang sesuai serta memahami data-data alternatif yang bisa dipakai sebagai pendukung argumentasi peneliti.
- b. Peneliti bisa membuat atau mengembangkan kembali kuesioner/instrumen lain dari penelitian terdahulu, sehingga data yang diinginkan bisa terekam dan memperoleh hasil yang memuaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hunger, J, David. Wheelen, L. Thomas. 2003. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Laporan Akhir Kajian. 2012. *Kesiapan Pemda Dalam Implementasi SAP Berbasis AkruaI Penuh Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010*. Pusat Penelitian Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kemendagri
- Mulyana, Budi. 2009. *Penggunaan Akuntansi AkruaI di Negara-negara Lain: Tren di Negara-negara Anggota OECD*. (<http://sutaryofe.staff.uns.ac.id/files/2011/10/akuntansiberbasisakruaI.pdf>). Diakses tanggal 9 Agustus 2013.
- Nordiawan, Deddi. Iswahyudi Sandi Putra, Maulidah Rahmawati. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Novalia, Eka. 2012. *Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Sampang)*. Surabaya : Repository UNAIR.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. 2010. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Priyatno, Dwi. 2012. *Belajar Cepat Olah Data Statistik dengan SPSS*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta